

**LAPORAN PROJECT BASED TRAINING
DATA ANALYTIC FOR AUDIT
BATCH II**

**Oleh
EKO YUDHIANTO
DIKLAT ANALYTIC FOR AUDIT BATCH II KELAS A**

Bab 1.

Data Umum Obyek Pengawasan

A. Gambaran Umum Topik Pengawasan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki mandat untuk melaksanakan pembinaan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dalam melaksanakan mandat tersebut, BPKP menerbitkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP yang merupakan salah satu terjemahan penting dari Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2015-2019.

Agenda Prioritas Pengawasan dengan dengan Tema Penguatan Tata Kelola, topik Kapabilitas APIP dengan kegiatan program pengawasan Penyusunan Laporan Triwulanan Pemantauan Perkembangan Kapabilitas APIP Triwulanan.

Laporan *Project Based Training Data Analytic For Audit* yang kami susun dengan menggunakan metode kualitatif, dengan berdasarkan pada data laporan triwulanan dari seluruh Inspektorat di wilayah Provinsi Gorontalo.

B. Identitas Obyek Pengawasan

Seluruh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di wilayah Provinsi Gorontalo telah mencapai Kapabilitas APIP level 3.

Dan Obyek Pengawasan yang akan dilakukan Data analitik adalah pada 7 (tujuh) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di wilayah Provinsi Gorontalo dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Inspektorat Provinsi Gorontalo
- 2 Inspektorat Kabupaten Gorontalo
- 3 Inspektorat Kabupaten Bone Bolango
- 4 Inspektorat Kabupaten Boalemo
- 5 Inspektorat Kabupaten Pohuwato

- 6 Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara
- 7 Inspektorat Kota Gorontalo

C. Matrik Desain Pengawasan

Matrik desain pengawasan adalah sebagai berikut:

No	Pertanyaan Audit	Informasi dibutuhkan dan Sumber	Metode Analisis Dipergunakan	Prakiraan Hasil
1	Apakah besaran Anggaran APIP telah memadai.	1. Jumlah anggaran Pemda; 2. Jumlah anggaran APIP. Sumber data : APBD dan DPA APIP (Laporan Triwulanan Kapabilitas APIP)	1. Analisis Deskriptif. 2. Analisis Perbandingan.	Tim menyampaikan informasi perkembangan kecukupan alokasi anggaran pengawasan di masing-masing Inspektorat

BAB 2

Kegiatan Analisis Data

A. Kegiatan Analisis Data

Analisis data dilakukan berdasarkan Laporan Perkembangan Peningkatan Kapabilitas APIP yang disusun oleh sebanyak 7 (tujuh) unit kerja Inspektorat di Wilayah Provinsi Gorontalo dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, dengan uraian antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan penggabungan data per tahun dan pengolahan/*cleansing* data agar data menjadi data set yang dapat diolah sebagai bahan analisis.
2. Analisis Deskriptif dan terkait kecukupan jumlah anggaran, kualitas dan kecukupan jumlah Sumber Daya Manusia serta penugasan pengawasan yang memadai telah dilakukan masing-masing APIP.
3. Visualisasi dan Interpretasi hasil pengolahan data.

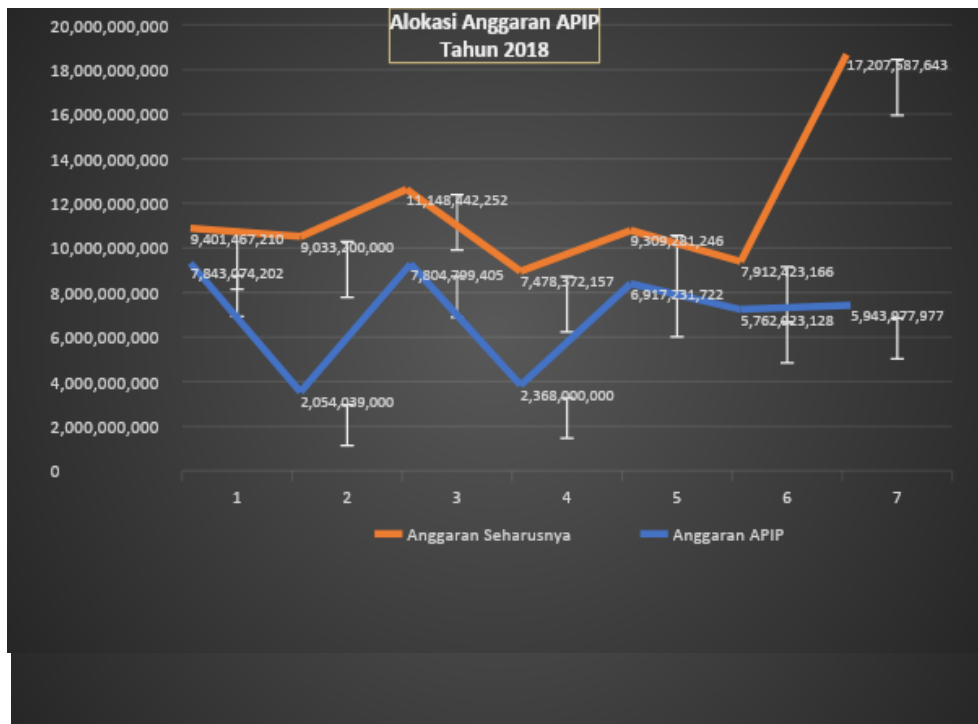
B. Uraian Analisis Data dan Hasilnya

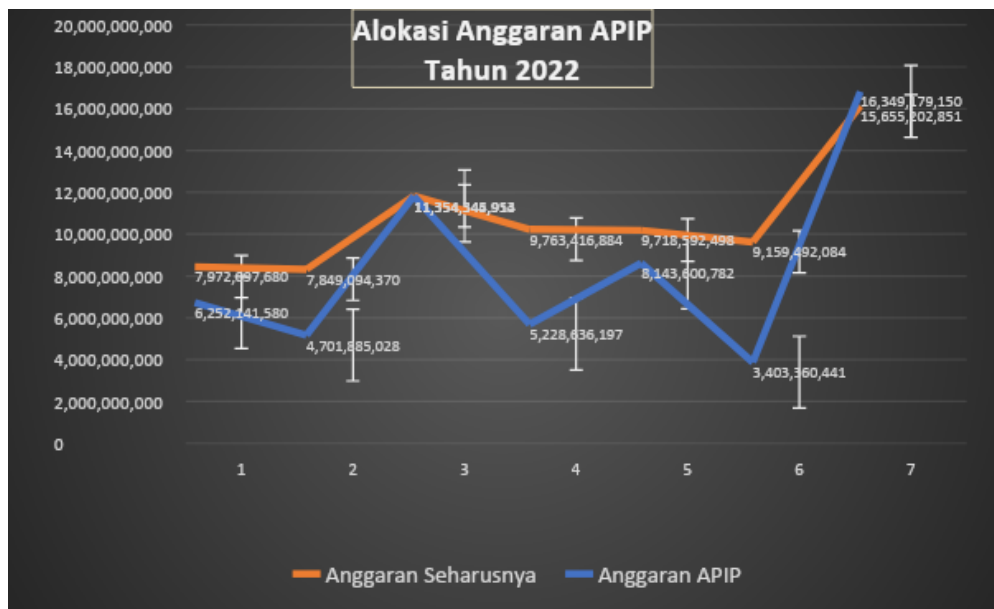
1. Kecukupan Jumlah Anggaran APIP.

Analisis terhadap data yang diperoleh terkait kecukupan jumlah anggaran APIP dilakukan dengan membandingkan dengan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 dan SE Mendagri Nomor 903/7325/SJ tentang Prioritas Anggaran Pengawasan yang menyebutkan besaran anggaran minimal APIP adalah sebagai berikut:

No	Pemda	Nilai APBD	% Alokasi Anggaran APIP Minimal dari Total Belanja Daerah
1	Pemprov	... ≤ Rp4 triliun	0,90%
	Pemprov	Rp4 triliun < ... ≤ Rp10 triliun	0,60% dan di atas Rp36 miliar
	Pemprov	... > Rp10 triliun	0,30% dan di atas Rp60 miliar
2	Pemkab/Pemkot	... ≤ Rp1 triliun	0,01
	Pemkab/Pemkot	Rp1 triliun < ... ≤ Rp2 triliun	0,75% dan di atas Rp10 miliar
	Pemkab/Pemkot	... > Rp2 triliun	0,50% dan di atas Rp15 miliar

Dari hasil pengolahan data set alokasi anggaran APIP dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, dapat disajikan dalam grafik dibawah ini :





BAB 3

Penutup

Dari hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa seluruh APIP di Wilayah Provinsi Gorontalo yang belum memperoleh alokasi anggaran yang cukup melaksanakan pengawasan secara memadai kecuali Inspektorat Kabupaten Pohuwato.